

AGENDA TAHUN INTERNASIONAL EKONOMI KREATIF: PENDEKATAN INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERKELANJUTAN

Enjum Jumhana¹, Mochamad Reggy Syah², Mohamad Dian Ferriawan Putra
Pratama³, M. Fachri Firdaus⁴, Raihan Adhi Saputra⁵
jumhanad@gmail.com¹, mochamadreggysyah06@gmail.com²,
mohamadianferri206@gmail.com³, muhamadfachrifirdaus20@gmail.com⁴,
raihanadhi.200@gmail.com⁵
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu, ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pilihan untuk mendorong perekonomian nasional melalui penggunaan teknologi dan mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah Indonesia bergabung dengan 81 negara lainnya sebagai inisiator dalam Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan (IYoCE) 2021 sedang diselenggarakan. Dalam Indonesia mengembangkan strategi domestik dan internasional untuk ekonomi kreatif sebagai bagian dari IYoCE 2021. Tiga ide tersebut akan memahami dan menganalisis bentuk-bentuk ekonomi kreatif Indonesia serta taktik untuk membangun ekonomi kreatif yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, studi ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang akan diteliti. Berdasarkan studi kasus International Year of Creative Economics 2021, yang didukung oleh sumber data primer dan sekunder. Menurut studi ini, Indonesia sedang mengambil langkah-langkah melalui diplomasi ekonomi dengan aktor internasional untuk memperkuat ekonominya dengan memimpin IYoCE 2021. inovatif dengan membentuk pertemuan ekonomi kreatif global dan menandatangani nota kesepahaman untuk mempromosikan investasi, perdagangan, dan pelatihan bagi para profesional bisnis kreatif. serta perdagangan produk dan layanan.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Pembangunan Berkelanjutan, IYoCE 2021.

ABSTRACT

Over time, the creative economy has become one of the options to drive the national economy through the use of technology and promote sustainable growth. Through the United Nations, the Indonesian government joined 81 other countries as initiators in The International Year of Creative Economy for Sustainable Development (IYoCE) 2021 is being held. In Indonesia, developing domestic Anonymous and international strategies for the creative economy as part of IYoCE 2021. These three ideas will understand and analyze the forms of Indonesia's creative economy as well as tactics to build a creative economy that drives sustainable growth. Furthermore, this study employs qualitative research techniques that will be examined. Based on the case study of the International Year of Creative Economics 2021, supported by primary and secondary data sources. According to this study, Indonesia is taking steps through economic diplomacy with international actors to strengthen its economy by leading IYoCE 2021. innovative by organizing global creative economy meetings and signing memorandums of understanding to promote investment, trade, and training for creative business professionals, as well as the trade of products and services.

Keywords: Creative Economy, Sustainable Development, IYoCE 2021.

PENDAHULUAN

Studi ini membahas strategi yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula, khususnya di Kecamatan Johan Pahlawan. Menurut Thompson (2017),

strategi merupakan langkah yang diambil individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan melewati berbagai tahapan, seperti penetapan sasaran, penyusunan rencana jangka panjang, pengorganisasian tindakan, dan pengelolaan sumber daya. Definisi serupa disampaikan oleh Fanaqi (2018) dan Wati (2019), yang menekankan bahwa strategi adalah perencanaan dan manajemen terstruktur dalam jangka waktu tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam penerapan demokrasi. Amin (2019) menyatakan bahwa partisipasi mencakup segala bentuk keterlibatan individu dalam aktivitas politik, baik dalam mendukung maupun menolak upaya politik seperti kampanye atau pemilu. Novita dan Fitri (2020) menambahkan bahwa partisipasi tidak hanya fisik, tetapi juga mencakup aspek mental dan emosional seseorang. Partisipasi ini sangat penting, terutama dalam konteks pemilu, di mana pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan ke depan (Lestari & Arumsari, 2018).

Pemilih pemula, yang umumnya berusia antara 17 hingga 22 tahun, merupakan kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau daerah. Mereka memiliki karakteristik seperti antusiasme tinggi terhadap pemilu, namun masih kekurangan pengetahuan politik yang memadai (Setyawan & Azmi, 2020; Wibowo et al., 2020). Karena itu, mereka menjadi sasaran utama dalam strategi kampanye politik dan pendidikan pemilu. Ardiani et al. (2019) dan Nur Wardhani (2018) menekankan bahwa pemilih pemula perlu dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai proses demokrasi agar mampu membuat keputusan rasional sebagai warga negara.

Partisipasi politik yang tinggi menjadi indikator positif demokrasi. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik bisa mencerminkan sikap apatis terhadap isu-isu kebangsaan, seperti fenomena golongan putih (golput) (Yuliati, 2017). Putri (2017) menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi bisa menjadi sinyal lemahnya demokrasi di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, keterlibatan politik pemilih pemula perlu menjadi perhatian serius, karena berimplikasi besar terhadap legitimasi politik dan kualitas pemilu itu sendiri (Islah et al., 2020; Wardhani, 2018).

Mahmudah (2016) menyebutkan bahwa suara pemilih pemula memiliki daya tarik tersendiri dalam strategi politik karena jumlah mereka yang signifikan dan potensi pengaruhnya terhadap hasil pemilu. Irrubai (2014) menegaskan bahwa banyak partai politik telah menyusun pendekatan khusus untuk merebut simpati kelompok ini melalui kampanye, pendidikan politik, hingga pendekatan emosional.

Pendidikan politik menjadi elemen penting dalam meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula. Pendidikan ini tidak hanya memperluas pengetahuan politik mereka, tetapi juga membantu dalam membentuk keterampilan berpikir kritis dan sikap politik yang bertanggung jawab (Azirah, 2019). Oleh karena itu, peran Badan Kesbangpol sangat krusial dalam menyusun dan melaksanakan program pendidikan politik yang efektif bagi pemilih pemula (Ansori, 2019; Munawarah & Kristanto, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol memiliki kewenangan dalam berbagai urusan politik dan organisasi masyarakat. Di antaranya adalah pendaftaran partai politik, penyelenggaraan pemilu, dan pembinaan organisasi sosial. Di wilayah Aceh Barat, Kesbangpol turut memfasilitasi kegiatan pendidikan politik seperti forum diskusi dan sosialisasi langsung ke komunitas.

Menurut data dari KPU Aceh Barat, sebanyak 4.346 orang (3,31%) memberikan suara pertama mereka dalam Pilkada 2017. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.234 pemilih

laki-laki dan 2.112 pemilih perempuan. Sementara itu, berdasarkan data KIP Aceh, tercatat ada 123.655 pemilih pemula di seluruh wilayah Aceh pada tahun 2017, yang mencakup sekitar 3,6% dari total jumlah pemilih. Jumlah ini menegaskan bahwa pemilih pemula merupakan kelompok signifikan yang tidak bisa diabaikan dalam perencanaan strategi politik daerah.

METODE PENELITIAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah di Aceh Barat adalah tempat di mana penelitian ini dilaksanakan. Studi ini dilakukan karena

Meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula adalah salah satu tanggung jawab mereka, dan para peneliti tertarik untuk mempelajari taktik Badan Kesatuan Nasional dan Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan.

Pendekatan kualitatif yang menggunakan metodologi deskriptif diterapkan dalam penelitian ini.

Pendekatan deskriptif adalah metodologi studi yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek berdasarkan data dan peristiwa aktual yang terjadi di lapangan.

Tujuan dari teknik deskriptif adalah untuk mengumpulkan data mengenai keadaan gejala saat ini.

Selama pelaksanaan studi (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Sumber data utama untuk penelitian ini adalah observasi dan wawancara, sementara sumber sekunder adalah data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai literatur dan referensi yang ditemukan secara online dan dalam jurnal. Wawancara informan penelitian dan observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan strategis yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan menunjukkan adanya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya perencanaan jangka panjang. Strategi tersebut berangkat dari prinsip dasar bahwa keberhasilan suatu organisasi dapat dicapai melalui penetapan tujuan jangka panjang, pemilihan tindakan yang tepat, dan alokasi sumber daya yang efisien.

Formulasi strategi Kesbangpol melibatkan identifikasi lingkungan, ancaman, peluang, kekuatan, dan kelemahan internal lembaga. Salah satu wujud konkritnya adalah penyusunan program sosialisasi yang menasar siswa kelas tiga SMA, atau mereka yang mendekati usia 17 tahun. Melalui pendekatan ini, Kesbangpol berupaya membentuk kesadaran politik sejak dini agar mereka tidak termasuk dalam golongan putih (golput).

Program sosialisasi ini tidak hanya menyampaikan informasi tentang tahapan dan teknis pemilu, tetapi juga bertujuan membentuk pemahaman dan tanggung jawab politik di kalangan pemilih pemula. Tujuan jangka panjang dari kegiatan ini adalah menciptakan warga negara yang sadar hak dan kewajibannya serta aktif dalam proses demokrasi. Sosialisasi politik dinilai sebagai instrumen penting dalam membentuk kepribadian dan kesadaran politik masyarakat.

Pendidikan politik memainkan peran sentral dalam strategi ini. Kesbangpol mengadopsi pendekatan edukatif dengan fokus pada tiga aspek utama: membentuk kepribadian politik yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa, meningkatkan pengetahuan politik agar masyarakat memiliki kesadaran kritis, dan mendorong partisipasi aktif dalam

pemilu dan pengambilan keputusan publik. Pendidikan politik ini menjadi sarana untuk menciptakan generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab secara politik.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui dua metode utama, yaitu Go To School dan Forum Group Discussion (FGD). Metode Go To School dilakukan dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah dan menyampaikan materi pemilu secara interaktif. Narasumber yang diundang pun beragam, mulai dari pejabat daerah hingga akademisi, guna memberikan perspektif yang komprehensif kepada siswa.

Sementara itu, FGD berfungsi sebagai ruang diskusi terbatas yang lebih intensif. Melalui FGD, peserta didorong untuk menyampaikan ide, kritik, dan pandangan mereka terhadap isu politik dan pemilu. Kegiatan ini terbukti mampu menciptakan interaksi yang lebih hidup dan menumbuhkan kesadaran politik secara bertahap. FGD yang diselenggarakan oleh Kesbangpol bahkan melibatkan berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pelajar, dan tokoh masyarakat.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasilnya belum menunjukkan peningkatan partisipasi politik yang signifikan. Data KPU Aceh Barat menunjukkan bahwa hanya sekitar 3,31 persen pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2017. Ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan masih perlu evaluasi lebih lanjut, terutama dalam efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Salah satu kendala utama dalam implementasi strategi ini adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Kegiatan sosialisasi seringkali terhambat karena belum adanya kesiapan teknis dan materi yang memadai di kalangan panitia pelaksana. Selain itu, kemampuan dalam menjangkau pemilih pemula secara luas juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kesbangpol.

Keterbatasan dana juga menjadi penghambat besar. Pencairan anggaran yang lambat dan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan menyebabkan tertundanya pelaksanaan program sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh sejumlah pejabat internal Kesbangpol yang menyebutkan bahwa fleksibilitas anggaran sangat menentukan keberhasilan strategi tersebut.

Selain anggaran, kualitas sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan kegiatan juga menjadi perhatian penting. Banyak panitia pelaksana belum mendapatkan pembekalan yang cukup mengenai materi politik, teknik komunikasi dengan generasi muda, serta pendekatan edukatif yang relevan. Ini menyebabkan kegiatan yang dilakukan kurang optimal dalam mencapai target sasaran.

Kesbangpol menyadari pentingnya meningkatkan kapasitas internal organisasi untuk mendukung strategi peningkatan partisipasi politik ini. Oleh karena itu, ke depan perlu ada pelatihan dan pembekalan yang lebih intensif bagi para pelaksana kegiatan, agar mereka mampu mengedukasi pemilih pemula dengan pendekatan yang lebih sesuai dan menarik.

Secara keseluruhan, strategi yang dirancang oleh Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat sudah mengarah ke jalur yang tepat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Perlu adanya perbaikan dalam perencanaan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta sinergi dengan lembaga pendidikan dan stakeholder lainnya agar strategi peningkatan partisipasi politik di kalangan pemilih pemula benar-benar memberikan dampak nyata.

KESIMPULAN

1) Rencana telah disampaikan oleh Bangsa dan Politik untuk tahap perumusan dan tujuan jangka panjang. Rencana telah dipresentasikan oleh Nation dan Politics untuk tahap perumusan dan tujuan jangka panjang.

kegiatan, seperti bersosialisasi dan forum diskusi, untuk meningkatkan partisipasi

politik pemilih pemula.

- 2) Pada tahap seleksi, Badan Kesatuan dan Politik Nasional telah melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui metode kunjungan ke sekolah dan diskusi kelompok terarah (FGD). Pada tahap seleksi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui metode go-to di sekolah dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Ini adalah strategi dengan kegiatan sosialisasi go-to.
- 3) Hingga saat ini, Kabupaten Aceh Barat belum memiliki dampak besar dalam meningkatkan keterlibatan politik di kalangan pemilih. Pendekatan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Saat ini, tidak ada kegiatan di Barat. menarik. Ini adalah salah satu alasan mengapa tingkat partisipasi pemilih muda di Kabupaten Aceh Barat masih tergolong rendah.

Pada saat ini, Badan Kesatuan Nasional dan Politik belum melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber dayanya atau mempersiapkan panitia untuk mengorganisir sosialisasi bagi pemilih pemula.

Hambatan pertama terhadap strategi Badan Persatuan untuk bangsa dan politik Kabupaten Aceh Barat dalam hal meningkatkan keterlibatan politik pemilih adalah proses distribusi dana yang panjang dan tidak memadai yang disediakan oleh pemerintah, yang menghambat perencanaan strategi tersebut. Kedua, mereka sedang mempersiapkan kegiatan partisipasi politik, sehingga ketidakadaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang tidak lengkap menjadi penghalang kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2019). Tanggung jawab pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik. *Jurist-Diction*, 2(3), 965. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14366>
- Ansori, Z. (2019). Pendidikan pemilih sebagai metode meningkatkan partisipasi dan keterampilan pemilih pemula menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.812>
- Ardiani, D., Kartini, D. S., & Herdiansyah, A. G. (2019). Strategi sosialisasi politik oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk membentuk pemilih pemula yang cerdas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>
- Arifin, A. (2017). Strategi manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin di perguruan tinggi. *EDUTECH Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 117–132.
- Azirah. (2019). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pesta demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 6(2), 86–100. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2735>
- Bouk, M. D., Festianto, D., Ip, S., Seran, M. S. B., Ab, S., & Si, M. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada di Kabupaten Malaka tahun 2020. *Jurnal Poros Politik*, 23–29.
- Cahyani, C. H. (2019). Sosialisasi politik dan partisipasi politik: Peran Kesbangpol terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kota Depok tahun 2018. [Skripsi tidak dipublikasikan], 22.
- Chandler, A. D., Jr. (1966). *Strategy and structure*. Doubleday, Anchor Books Edition.
- Djuwita, A. (2016). Politisi perempuan dalam bingkai media (Analisis Framing Robert Entman atas pemberitaan politisi perempuan di media cetak). *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 4(1). <https://doi.org/10.12928/channel.v4i1.4203>
- Fanaqi, C. (2018). Strategi komunikasi KPU Kabupaten Garut dalam sosialisasi Pemilu 2014 kepada kelompok disabilitas. *Journal Uniga*, 4(1), 24–41.
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah. *Jurnal*

- Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, 6(1), 102244.
- Handoyo, S. (2011). Sinergi antara good corporate governance dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam meminimalisir dan pencegahan fraud dalam suatu organisasi. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 10(9), 1257–1269. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol10.iss9.art4>
- Irrubai, M. L. (2014). Partai politik dan pemilih pemula. *Society*, 5(2), 61–71. <https://doi.org/10.20414/society.v5i2.1458>
- Islah, K., Juardi, J., & Nasim, E. S. (2020). Sosialisasi Pemilu 2019 untuk pemilih pemula Kota Depok. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 46–50. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i1.969>
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. [Jurnal Tidak disebutkan], 1(1), 39–47.
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikota Semarang. *Integralistik*, 1, 63–72.
- Mahmudah, D. (2016). Akses informasi politik (Perspektif pemilih pemula menjelang Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 20(2), 241. <https://doi.org/10.31445/jskm.2016.200208>
- Munawarah, R., & Kristanto, A. A. (2022). Alienasi pemuda dalam politik: Peran nilai dan kepercayaan politik pada partisipasi politik pemilih pemula. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(1), 32. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i1.7081>
- Novita, D., & Fitri, A. (2020). Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2019. *Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya*, 7(2), 56–84.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Padang, A. T., & Megawati. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. [Jurnal Tidak disebutkan], 2(September), 522–532.
- Pangestuti, S., Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2018). Pembelajaran politik untuk pemilih pemula melalui media sosial di Purwokerto – Jawa Tengah. *Warta ISKI*, 1(2). <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v1i02.21>
- Putri, N. E. (2017). Dampak literasi politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.219>
- Rivai, A. B. (2016). Politisasi media di 2014: Aburizal Bakrie dan segmen pemilih pemula. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9078>
- Sakinah, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam politik sebagai implementasi demokrasi. *OSF Preprints*. <https://osf.io/preprints/hra7t/>
- Setyawan, R., & Azmi, A. (2020). Persepsi pemilih pemula tentang hak memilih dalam mengikuti pemilu di Nagari Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. *Journal of Civic Education*, 2(5), 440–445. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.289>
- Thompson, J. D. (2017). *Organizations in action: Social science bases of administrative theory*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315125930>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.
- Wati, R. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang. *Αγοη*, 8(5), 55.
- Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 152. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433>
- Yuliati, R. (2017). Penggunaan internet terhadap peningkatan partisipasi politik dan kehidupan demokrasi. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 2(2).

<https://doi.org/10.30813/bricolage.v2i02.840>

Yusnedi, & Utami, S. (2019). Buku ajar sosiologi politik seri: Pemilihan umum serentak di Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=8bPODwAAQBAJ>

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). The type of descriptive research in communication study. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90.